

Fenomena Korporasi dalam Konstelasi Internasional (Tinjauan Teoritis)

Dewi Sinorita Sitepu & Silvia Dian Aggraini

Dewi Sinorita Sitepu, Departemen Ilmu Hubungan Internasional dan Peneliti di *Center for International Relations Studies* (CIReS), FISIP-UI, sedang melanjutkan studi Kajian Kawasan Asia Tenggara, di Universitas Kyoto -Jepang.

Silvia Dian Anggraini, Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI dan asisten peneliti di *Center for International Relations Studies* (CIReS) FISIP UI.

Multinational corporations (MNCs) are key agents transforming the international and political economy landscape. They are highly visible organization with great power and mobility, they inspire both awe and fear. This article tries to explain the conceptual framework of multinational corporations by analyzing their relationship with state, local enterprises, and non-governmental organizations and how their impact in global political economic constellation. Thus, Leon Grunberg said that if one believes that economic growth overrides all other considerations, then one is likely to see MNCs as sources of progress in the world. However, if one believes that the pursuit of balanced development is preferable, then MNCs may represent forces exacerbating inequality and exploitation.

Keywords: MNCs, state's role, global political economy.

Pendahulu an

Jika menelaah konsep korporasi, maka asumsi ai,yal yang terbentuk di pikiran kita cenderung berdirnensi ekonomi (pasar) daripada po litik. **Ini** dikarenakan, aktivitas bisnis yang dijalankan pelaku ekonomi termasuk korporasi selalu bertujuan mengejar keuntungan (*profit*) dan

menghasilkan sebanyak mungkin uang. Sebagaimana dinyatakan Joseph E. Stiglitz (2006): "Business pursues profits, and that means making money is their first priority." (Stiglitz, 2006: 188).

Stiglitz rnenambahkan, untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh, korporasi berupaya sedemikian rupa menekan biaya produksi; atau jika perlu `manipulasi' aturan main yang berlaku seperti menghindar dari pajak, menggelapkan jaminan kesehatan buruh, termasuk membatasi anggaran yang seharusnya digunakan untuk rehabilitasi lingkungan akibat limbah dari pola produksi mereka.

Walau demikian, praksisnya, korporasi tidak hanya bermuatan dimensi ekonomi, tapi juga memiliki kekuatan pengaruh dan posisi tawar secara politik. Korporasi dalam aktivitas bisnisnya terkadang juga bersinggungan dengan persoalan lingkungan hidup dan turut berperan dalam menciptakan budaya global atau penyeragaman selera (*homogenizing of taste*) (Bernauer, www.cis.ethz.ch/education/Bernauer_polecon.pdf. Bahkan, korporasi menjadi `simbol' anomali proses globalisasi akibat praktik bisnis yang dijalankannya. Ini dapat diperhatikan dari contoh kasus, misalnya, penyuapan yang dilakukan Mosanto terhadap pejabat Indonesia agar mengubah ketentuan pemerintah soal dampak lingkungan dari varietas transgenic (*Gatra*, 2 Februari 2005).* Ataupun, kasus aksi protes masyarakat urban di Chocabamba Bolivia akibat semakin tak terjangkau air karena bergesernya konsep air dari barang publik menjadi barang ekonomi setelah diakuisisi Betchel Corporation —perusahaan air minum dari AS (Stiglitz, 2006, lihat pula http://www.democracctr.org/bechtel/bechtel_corp.html, 29 Desember 2006).

Sebelum masuk analisis kritis tentang jejaring bisnis korporasi, keterlibatan dalam percaturan politik dan *critical assesment* dari aktivitas bisnis yang dilakukan; akan diuraikan lebih dahulu bagaimana studi hubungan internasional mencermati kehadiran korporasi dalam dinamika ekonomi politik internasional. Dalam bagian ini, akan disinggung pula bagaimana jaringan bisnis korporasi mengubah kesadaran kita tentang arti batas negara, kedaulatan, dan kapasitas negara untuk mengendalikan modal.

Mosanto adalah korporasi yang bermarkas (*home country*) di Amerika Serikat, Mosanto, perusahaan pestisida yang ditahun 2001 mengajukan izin untuk mengembangkan kapas transgenik di Sulawesi Selatan. Departemen Pertanian memberi izin untuk penanaman kapas transgenik di lahan seluas 10 ribu hektare (ha) selama satu tahun. Akan tetapi, Mosanto hanya merealisasikan di lahan seluas 4.000 ha. Departemen Kehaldman dan Badan Pengawas Pasar Modal Amerika Serikat mengenakan denda pada perusahaan ini sebesar 1,5 juta dollar AS atas praktik suap terhadap pejabat yang dilakukan cabang perusahaannya di In donesia.

Negara dan Korporasi

Jika kita menelaah faktor-faktor yang mendorong percepatan globalisasi dan dampaknya terhadap negara, dapat dicermati bahwa salah satu tekanan atas posisi negara dalam dinamika globalisasi saat ini yakni lebih sulit bagi negara untuk mengontrol modal dibandingkan buruh **di tingkat domestiknya**. ini dikarenakan, modal hanya mengenal konsep '*profit*' dan cenderung tidak peduli dengan semangat kesetiaan nasional (Papps, 2002, lihat pula Ohmae, 1995).

Korporasi tidak mempertimbangkan dampak yang dirasakan negara seketika is memindahkan investasi ke tempat lain seperti terciptanya pengangguran, hilangnya pendapatan negara dari sektor pajak, ataupun beragam dampak luas lainnya (*multiplier effects*).

Ini disebabkan, korporasi -dengan kekuatan modal yang dimiliki- dalam bertindak selalu didasari pilihan rasional (*rational choice*) dengan memperhitungkan *opportunity cost* dari setiap keputusan bisnis yang dilakukan (Palan, 2000). Artinya, keputusan bisnis korporasi tidak pernah berbasis pada pertimbangan moralitas apalagi diwarnai semangat berderma (*charity*). Keputusan bisnis yang dilakukan selalu dilandasi kalkulasi untung (*benefit*) dan rugi (*cost*) atas berbagai pilihan yang ada. Berbasis pada nilai-nilai seperti ini, maka ketika suatu negara (wilayah) dirasa tidak lagi kompetitif, korporasi tidak segan untuk mengalihkan investasi ke tempat lain yang lebih menguntungkan dan sekaligus dapat menurunkan biaya produksi (*cost production*).

Sebagaimana dinyatakan Richard Langhorne, signifikansi dari globalisasi kapitalisme saat ini ditandai dengan semakin mendalam, intensif, dan menyatunya (*interconnected*) transaksi lintas batas (*cross-border transactions*) antarnegara dimana sumber daya (*resources*), kapabilitas, barang, dan jasa memiliki mobilitas yang tinggi dibandingkan sebelumnya (Langhorne, 2006: 105-111). Korporasi dalam hal ini tentunya memainkan peranan besar dalam mendorong percepatan perpindahan (*volatility*) *cross border markets* alas modal, finansial, produk, dan jasa.

Mencermati realitas ini, Joshua S. Goldstein menambahkan, meskipun negara tetap merupakan aktor utama penentu kebijakan dan kerjasama ekonomi, akan tetapi dahliia praktiknya seluruh transaksi ekonomi dijalankan aktor swasta (individu pelaku pasar); dan dari seluruh aktor swasta ini korporasi (*multinational corporations*)

merupakan pemain pasar terpenting (Goldstein, 2007: 361 -362). Jika kita perhatikan aktivitas perdagangan dunia saat ini, 70% dikendalikan korporasi dan 200 korporasi top dunia mengendalikan 1/4 aktivitas ekonomi global dengan pendapatan pertahun dapat mencapai **28%** dari PDB dunia (<http://www.nirjdeva.com/book/ri.htm>). Bahkan, pendapatan pertahun korporasi dapat melampaui pendapatan negara. Sebagai contoh, tahun 2005, total keuntungan penjualan retail dari Wal-Mart's mencapai \$ 285,2 miliar dollar AS, jauh melampaui kombinasi PDB seluruh negara di kawasan Sub-Sahara Afrika (Stiglitz, **2006**: 188).

Jika kita merunut **100** aktor ekonomi terbesar dunia, 48 merupakan negara, sedangkan sisanya dikendalikan korporasi dengan total keuntungan penjualan bisa mencapai \$51-247 miliar dollar AS per tahunnya (<http://www.stwr.net/content/view/1164/>). Menariknya, di tahun 2002, 70% ekonomi dunia dikendalikan 500 korporasi besar, dan kombinasi penjualan 200 korporasi ini mencapai 28% total pendapatan dunia. Namun, ironisnya 200 top korporasi dunia ini hanya mempekerjakan 0,82% dari total angkatan kerja global.

Shana J. Sadowski (2005) juga menjabarkan bagaimana pertumbuhan dan dominasi *power* korporasi dalam ekonomi internasional dapat dikatakan meningkat secara signifikan. Sebagai contoh, tahun 2003, lebih dari 65.000 korporasi melakukan bisnis dan kontrol atas aset di beberapa negara sekaligus. Begitu pula jumlah ekspor yang dilakukan korporasi meningkat berarti dari 25% di tahun 1980 -an menjadi 1/3 ekspor global di tahun 1990-an. Selain itu, korporasi juga turut memainkan peran yang signifikan di bidang produksi, distribusi, dan penjualan produk di negara maju dan berkembang. Bahkan, angka penjualan 100 top korporasi dunia meningkat dari \$ 3,2 triliun di tahun 1990 menjadi \$ 4,8 triliun tahun 2000 (http://vava.v.pon.org/downloads/ien14_2sadowski.pdf).

Dari uraian ini, terlihat bahwa negara tidak lagi dapat dilihat sebagai aktor tunggal dalam arena ekonomi politik internasional. Faktanya, korporasi juga turut memainkan peran signifikan dalam mengukuhkan arti penting pasar dalam transaksi ekonomi politik global.

Walau demikian, realitas ini tidak berarti menegasikan peran penting negara dalam transaksi ekonomi politik global. Artinya, ada ranah di mana negara dan pasar memiliki kepentingan yang saling bersinggungan (*intersection*) dan saling membutuhkan. Argumentasi ini berangkat dari tiga dasar pemikiran.

Pertama, meskipun negara bukan lagi pelaku tunggal dalam kegiatan ekonomi global, namun negara tetap memainkan peran penting dalam membuat perjanjian dan keputusan (*deal*) bisnis di level internasional. Sebagai contoh, perluasan kerjasama perdagangan bebas bilateral (BFTA) maupun multilateral di bawah WTO tetap diputuskan di tingkat negara meskipun sesungguhnya kesepakatan ini lebih merepresentasikan kepentingan korporasi dibandingkan *real economy needs* di tingkat masyarakat (*the people*) (Chandra, 2005, lihat juga Prambudi dan Chandra, 2006). Selain itu, menarik dicermati diaturnya ketentuan Hak Milik Intelektual (*Intellectual Property Rights*) dalam perjanjian perdagangan bebas. Aturan terkait hak milik ini jelas menunjukkan kuatnya lobi kelompok bisnis dalam perjanjian perdagangan yang disepakati oleh aktor negara. Karena faktanya, HAM lebih merepresentasikan kepentingan korporasi besar dalam hal perlindungan inovasi teknologi yang dilakukan maupun perolehan laba mengingat besarnya investasi dana yang dialokasikan bagi R & D (*research and development*) untuk menciptakan temuan-temuan baru tersebut.

Kedua, dalam realitasnya, korporasi tetap memerlukan peran negara dalam memfasilitasi dan mempermudah bertransaksi. Ini dapat dicermati dari lobi-lobi bisnis yang dilakukan korporasi terhadap birokrat (*decision maker*), baik di tingkat domestik ataupun forum internasional untuk dihasilkannya aturan main yang semakin kondusif bagi akses pasar. Korporasi juga membutuhkan negara untuk memfasilitasi tersedianya sarana suprastruktur dan infrastruktur yang memadai, seperti regulasi yang jelas -berkaitan dengan aturan main soal investasi, perijinan usaha, perpajakan, lingkungan hidup, dan perburuhan- dan terutama terciptanya situasi ekonomi politik yang stabil untuk berinvestasi. Semua elemen ini sangat dibululikan korporasi dalam bertransaksi dan tentunya peran sentral aktor negara tak terelakkan.

Ketiga, korporasi juga membutuhkan proteksi negara untuk membatasi kompetisi dengan penyalur asing (*foreign suppliers*). Biasanya, kelompok bisnis ini berusaha mempengaruhi birokrat untuk dihasilkannya kebijakan yang dapat membatasi masuknya kompetitor asing ke dalam sektor bisnis domestic, misalnya *entry barriers*. Efek negatif dari kebijakan seperti ini menciptakan tumbuhnya kelompok pemburu rente (*rent seeking activities*) yang mencari keuntungan ekonomi tanpa melakukan aktivitas bisnis hanya karena kedekatannya dengan orang dalam (*insider man*).

Korporasi, *State Sovereignty* dan Politik

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa selain mendatangkan keuntungan bagi negara, korporasi juga menghadirkan tantangan sendiri bagi eksistensi negara, mencermati kekuatan modal dan peran ekonomi politik yang dimainkannya. Seperti diuraikan sebelumnya, korporasi turut berperan menggeser pemahaman kita mengenai konsep kedaulatan negara (*sovereignty*), baik dalam kapasitas untuk mengontrol modal (*in-out flow capital*) ataupun otonomi dalam menentukan kebijakan ekonomi domestik. Dalam uraian ini, akan dijelaskan beberapa tantangan yang dihadapi negara dengan kehadiran korporasi.

Pertama, semakin terbatasnya otonomi negara untuk mengontrol investasi dalam batas wilayahnya (*borderless state*). Dalam hal ini, negara tidak punya kapasitas untuk memberlakukan sanksi hukum mencegah investor asing melarikan investasinya ke negara lain. Apalagi, jika negara tersebut menerapkan sistem devisa bebas. Fakta yang ada menunjukkan, korporasi tidak segan-segan untuk memindahkan investasinya seketika *host country* dirasa tidak lagi menguntungkan. Sebagai contoh, menarik dicermati ketika Indonesia mencanangkan 2003 sebagai tahun investasi, namun ironisnya dalam rentan waktu itu pula investasi asing di Indonesia terus merosot. Laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan jelas menggambarkan buruknya perkembangan investasi negara. Tahun 1997 misalnya, PMA mencapai \$33,816 miliar dolar AS dengan 783 unit proyek namun di tahun 2002 tinggal \$9,744 miliar dolar AS (*Kompas*, 6 Maret 2003). Kasus yang sama juga menimpa industri sepatu dan elektronik, seperti PT Primarindo Asia Infrastructure (Reebok), PT Doson Indonesia (Nike), dan Sony Electronic. Ketiganya menutup pabrik di Indonesia dan hengkang ke Vietnam dengan alasan biaya infrastruktur yang semakin mahal, maraknya aksi mogok kerja buruh dan tuntutan kenaikan upah, buruknya sistem hukum, ditambah pula persoalan instabilitas sosial dan politik domestic (*Kornpas*, 6 Maret 2003).[—]

Kedua, meskipun negara diuntungkan dengan masuknya korporasi karena mendorong terjadinya transfer kekayaan (*inflow of productive*

** Di tahun 2003, Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti mengakui kelesuan iklim berusaha di Indonesia yang diciptakan pemerintah. Delisainya, prosedur yang sangat panjang dalam pengurusan izin usaha dan kepabeanan. Pembertakuan pajak yang tinggi, ketenagakerjaan, serta kondisi sarana dan prasarana yang tidak memadai, sehingga mengakibatkan arus mobilisasi barang dan jasa dari kawasan sentra produksi ke konsumen/pasar tersendat

wealth), transfer teknologi, dan tata kelola perusahaan (*sophisticated management*); akan tetapi bagi negara, korporasi juga merupakan ancaman atas peran administratif yang selama ini dimainkannya (*administrative and regulatory capability*) (Goldstein, http://socialistregister.com/socialistregister.com/files/SR_1974 Goldstein.pdf). Walter Goldstein menjelaskan, fenomena ini tidak hanya terjadi di negara berkembang tapi juga negara maju. Ia mencontohkan bagaimana industri otomotif dan komputer Inggris saat ini didominasi afiliasi korporasi raksasa milik AS. Demikian pula dengan Kanada yang 63% industri domestik dan aset di sektor mineral telah dikuasai modal asing. Implikasi langsung yang dirasakan negara adalah ketika perusahaan raksasa ini mengubah kebijakan soal buruh, produksi ataupun investasinya di *host country* secara langsung turut memengaruhi fokus negara atas persoalan pengangguran, pendapatan negara dari sektor ekspor ataupun pajak.

Ketiga, lemahnya posisi tawar negara terhadap korporasi karena kebutuhan akan investasi. Menarik dicermati, meskipun negara -kelompok politik lokal anti pasar- bersuara keras mengkritik dampak negatif dari praktik bisnis korporasi, faktanya negara juga berlomba menarik korporasi untuk berinvestasi dengan menawarkan berbagai insentif dan kemudahan (Hoekman dan Keane, 1996). Ini dikarenakan masuknya korporasi bersama modal yang dibawa ke *host country* selain menambah pendapatan negara dari sektor pajak juga dapat menyerap tenaga kerja lokal, menciptakan lapangan usaha baru bagi penduduk lokal (*trade creation*), dan berkembangnya sarana infrastruktur di sekitar wilayah beroperasinya korporasi —contohnya sarana penerangan, air bersih ataupun jalan.

Keempat, tak terhindarkannya keterlibatan korporasi dalam dinamika percaturan politik domestik sebagai upaya melindungi modal yang ditanamkan di *host country*. Contoh dari argumentasi ini diuraikan Daniel S. Papps (2002) tentang bisnis AS di Chili. ITT -korporasi jasa telekomunikasi AS- dengan bantuan Badan Intelijen AS diindikasikan turut terlibat dalam proses pemilihan presiden di Chili tahun 1973. Ini terlihat dari adanya upaya AS untuk mencegah terpilihnya Salvador Allende -kandidat yang didukung mayoritas rakyat Chili- karena agenda ekonominya berorientasi nasionalis dan tak sejalan dengan kepentingan investasi ITT. Agenda kebijakan seperti ini tentu saja tak menyenangkan AS yang telah menanamkan investasinya di sektor jasa telekomunikasi lokal. Dengan lobi-lobi politik di tingkat elit politik AS, ITT berhasil 'menggagalkan' terpilihnya Allende dan mendukung Augusto Pinochet Ugarte yang diusulkan menjadi presiden Chili meski dengan gaya pemerintahan militeristik.

Kelima, dari uraian di atas, terlihat bahwa korporasi dapat bekerja dengan sistem politik (pemerintahan) apapun selama sistem tersebut mendukung bekerjanya pasar. Menarik dicermati, korporasi tidak peduli apakah suatu negara menganut sistem politik demokrasi atau militeristik otoritarian sekalipun. Korporasi dapat berkompromi dengan bentuk pemerintahan apapun selama sistem itu kondusif dengan kepentingan bisnisnya. Ini dengan jelas tergambarkan dalam kasus investasi AS di Chili tahun 1973. Patut dicatat bahwa korporasi tidak mengusung nilai-nilai moralitas dalam agenda bisnisnya. Seperti dinyatakan Stiglitz, bagi korporasi tidak ada yang salah secara moralitas jika harus menyuap pejabat birokrat untuk melancarkan kepentingan bisnisnya. Tindakan seperti ini jauh lebih efisien daripada mengikuti jalur prosedur resmi yang berbelit-belit, menguras ongkos tinggi dan belum tentu mencapai sasaran yang ditargetkan karena bagi korporasi kepentingan bisnis merupakan moralitas itu sendiri.

Keenam, salah satu kendala negara mengontrol perolehan laba korporasi yakni transfer *pricing* strategies (Goldstein, http://www.ctj.org/hid_ent/part-2/part2-4.htm). Strategi ini biasanya dimainkan korporasi menghindari dikenakannya pajak tinggi oleh negara. Faktanya, strategi ini cukup menyulitkan negara mengontrol besaran pajak yang seharusnya dikenakan pada korporasi. Apa yang dimaksud dengan *transfer pricing strategy* yakni, untuk menghindari pajak, korporasi melakukan *mark-up* biaya produksi (*expense*) dan menekan perolehan laba (*income*) dengan cara mengimpor komponen produksi dari cabang perusahaannya yang ada di negara lain. Senyatanya impor ini tidak dibutuhkan karena dapat diproduksi sendiri dan trik ini sengaja dikembangkan sebagai strategi menurunkan nilai transaksi perolehan laba. Strategi seperti ini sangat merugikan negara di sektor pajak. Namun demikian, dalam realitasnya banyak ruang yang tetap memungkinkan korporasi bermanuver untuk melakukan *mark-up* pengeluaran dan menghindar dari pajak. Sebagai contoh, tahun 1987, dalam laporan tahunan IBM kepada *stockholders* disebutkan, 1/3 perolehan profit korporasi ini berasal dari aktivitas bisnisnya di AS. Namun, dalam laporan pajak ke pemerintah federal, IBM menyebutkan bahwa seluruh perolehan keuntungan IBM terkuras untuk mengembangkan R&D dan keuntungan pemasaran produknya di AS hanya tersisa sekitar \$25 miliar dolar AS. Dengan argumentasi seperti ini, di tahun 1987, IBM lobs dari *federal income tax* sama sekali (http://www.c.org/hid_ent/part-2/part2-4.htm).

Selain dilema soal pajak, korporasi juga semakin mengukuhkan tipisnya *sentiment* nasionalis konsumen atas produk. Untuk mengejar profit, nilai-nilai yang diusung korporasi yakni bagaimana

menawarkan produk dengan kualitas baik, harga bersaing, unggul dalam inovasi, atau justru menciptakan kebutuhan Baru dengan bermain di ranah *fantasy* dan *expectacy* konsumen. Strategi ini sangat dipahami Nokia melalui inovasi produk selular yang ditawarkan dengan mengusung jargon '*connecting people*' yang menciptakan kesan seakan Nokia merupakan solusi atas kegagapan komunikasi sosial individu.

Begitu juga dengan persoalan asal produk (*rule of origin*). John Spanier (1993) menjelaskan, meningkatnya interdependensi dan penekanan asas efisiensi dalam proses produksi korporasi turut mengaburkan *rule of origin* dari suatu produk. Sebagai misal, meskipun Jaguar dikenal sebagai mobil mewah buatan Inggris, akan tetapi komponen dari kendaraan ini tidak sepenuhnya berasal dari negara ini. Beberapa komponen mobil mewah ini seperti mesin, *body*, rangka mobil, ban, ataupun onderdil lainnya bisa saja *assembly* dari negara lain seperti Cina ataupun Jerman.

Mencermati peran korporasi dalam arena ekonomi global saat ini, tidak tmemadai lagi jika analisis terhadap konstelasi ekonomi politik internasional hanya ditekankan pada pendekatan *state-centric* semata. Ini terbukti, ada ranah seperti pasar (*market*) dan modal yang tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada negara karena keterbatasan kapabilitas bisnisnya. Namun, perlu disadari dengan semakin terbukanya porsi korporasi untuk bermain dalam aktivitas pasar juga berimbas terhadap konsepsi (*mind-set*) yang telah terbentuk mengenai otonomi negara dan peran negara di level sistemik (internasional).

Walau demikian, patut disadari bahwa tidak semua persoalan negara dapat diserahkan sepenuhnya pada peran pasar (*private sector*). Ada ranah di mana peran sentral negara tetap sangat diperlukan publik. Negara sangat dibutuhkan untuk mewujudkan keadilan distribusi barang publik, keadilan berkonsumsi, menekan kemiskinan, melindungi hak rakyat untuk hidup layak termasuk semangat sosial lain yang mengikutinya dimana korporasi tidak berkepentingan di dalamnya.

Untuk itu, menarik diulas, apa yang menjadi kepentingan korporasi dalam berinvestasi dan persinggungan beragam persoalan yang dihadapi, seperti masalah lingkungan hidup, juga budaya dalam praktik bisnis yang dijalankan.

Korporasi dan Penanaman Modal Asing

Korporasi *-multinational* atau *transnational corporations* -didefinisikan sebagai perusahaan yang memiliki *base (home country)* di negara maju -seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Kanada dan Australia- dan melakukan ekspansi bisnis di negara lain (*host country*) (Spanier, '993). Korporasi juga dapat didefinisikan sebagai kelompok usaha yang memiliki dan melakukan kontrol atas fasilitas produk/jasa di *host country* atau di luar negara asalnya (*home country*) (*National Trade Data Bank*, 1994). *Host country* tidak hanya terbatas pada negara berkembang saja, tapi juga antarnegara maju sendiri. Sebagai contoh, *Bridgestone Americas Holding Inc (tires company)* milik AS menanamkan modalnya di Inggris dengan mengakuisisi *Firestone*, salah satu *big tires company* milik negara

Investasi korporasi di suatu negara -secara garis besar- dapat dilakukan dalam dua cara. Pertama, *sharing* kepemilikan saham sebesar 25% untuk eksplorasi sumber daya yang ada di *host country*. Contoh penjelasan ini terlihat jelas dalam keterlibatan korporasi asing yang bekerja di bawah kontrol Pertamina dan tergabung dalam Kontraktor Production Sharing (KPS). Seluruh korporasi ini hanya mendapat porsi 25% *sharing* eksplorasi sumber minyak dan gas bumi lokal. Selain itu, aktivitas bisnis korporasi ini hanya dibatasi pada pengeboran/eksplorasi sedangkan seluruh aktivitas di luar itu seperti pengolahan, penjualan dan distribusi sepenuhnya dikontrol Pertamina. Kedua, cara lain yang dipilih korporasi dalam berinvestasi yakni melalui investasi langsung (PMA) atau akuisisi (pengambilalihan) kepemilikan saham sebesar 70% - 100%. Investasi seperti ini biasanya ditandai dengan beberapa karakteristik: (1) penanaman modal ditandai dengan dioperasionalkannya sarana fisik (infrastruktur) seperti pabrik atau kantor di *host country*, (2) dilakukannya rekrutmen tenaga kerja lokal, (3) terjadinya transfer *management* perusahaan, (4) dilakukannya proses produksi dengan menggunakan kandungan lokal (*local content*). Dari uraian ini terlihat bahwa aktivitas bisnis korporasi tidak dapat dipisahkan dari Penanaman Modal Asing (PMA). Maraknya PMA juga berkorelasi dengan cakupan ekspansi bisnis korporasi di luar *home country*-nya. Bagi korporasi, negara berkembang merupakan tujuan pasar sekaligus penyedia sumber daya - *natural resources*, buruh, dan lainnya- yang dibutuhkan dalam berproduksi. Mengacu laporan International Finance Corporation, dari tahun 1990-2000, arus masuk PMA ke negara berkembang meningkat

23% per tahun dengan nilai transaksi di pasar modal mencapai \$ 5 triliun dollar AS di tahun 2006.

Beberapa pertimbangan strategis mengapa korporasi melakukan ekspansi PMA (*foreign direct investment*) ke negara lain. Pertama, menghindari kebijakan proteksi barang impor dari pemerintah *host country*, baik yang bersifat tarif maupun non tarif. Kedua,antisipasi atas fluktuasi nilai tukar mata uang yang tidak pasti yang berpengaruh terhadap harga jual suatu produk. Ketiga, *following the customers*. Korporasi membuka cabangnya di *host country* dikarenakan signifikannya jumlah konsumen di suatu kawasan (negara); dan PMA merupakan langkah efektif 'mengejar' konsumen. Keempat, tersedianya sumber daya alam dan buruh yang relatif murah bagi proses produksi. Kelima, ketatnya ketentuan dan aturan main lingkungan hidup di *home country* menjadi alasan tersendiri bagi korporasi untuk mengalihkan investasinya ke *host country*. Kebijakan lingkungan hidup yang ketat di negara maju (*home country*) dipandang justru menambah beban belanja (*cost production*) dari korporasi.

Susan E. Feinberg dan Michael P. Keane menyatakan bahwa, antara tahun 1982-1994, setengah dari perdagangan dunia (*global trade*) melibatkan korporasi (Feinberg dan Keane, 2002). Perdagangan ini memiliki dua karakteristik. Pertama, *arms length trade*, yakni perdagangan yang dilakukan dalam bentuk pengiriman barang antardivisi korporasi ataupun terhadap pembeli dan penyalur (*suppliers*) di negara lain. Kedua, *intro firm trade*. Perdagangan ini ditandai dengan pengiriman barang antara korporasi di *home country* dengan afliasinya di negara lain. Dalam realisasinya, bisnis *intra firm trade* berkembang jauh lebih cepat dibandingkan *arms length trade*. Tahun 1982-1994, misalnya, perdagangan *intro firm trade* meningkat hingga 40% dari seluruh total transaksi perdagangan korporasi yang bermarkas (*home country*) di AS.

Contoh model perdagangan *intro firm* ini dapat diamati dari aktivitas bisnis perusahaan minuman ringan Coca-Cola di Indonesia. Sebagai contoh, perusahaan Coca-Cola mengimpor *concentrate (chic food substance)* bahan dasar membuat minuman ringan (*soft drink*) juga botol kemasan produk dari *subdiaries* di negara lain untuk proses produksi dan pemasaran di Indonesia karena pertimbangan *cost* produksi yang lebih murah dibandingkan hams diproduksi kembali di Indonesia.

Memperhatikan jangkauan jaringan bisnisnya, adalah tepat jika korporasi diposisikan sebagai agen globalisasi. Samuel J. Pamilsano (2006) menjelaskan, pergeseran pola mobilitas bisnis korporasi tidak hanya berdampak pada negara tapi juga masyarakat (*society*). Pergeseran ini, misalnya, dapat diamati dalam pola bisnis korporasi di China dan India. Diestimasi, antara tahun 2000-2003, sekitar 60.000 pabrik manufaktur dibangun di China, seperti industri kimia (Eropa), perusahaan otomotif (Jepang) ataupun konglomerasi dari AS. Beberapa pabrik yang dibangun korporasi asing ini tidak hanya menargetkan penjualan untuk pasar lokal (*Chinese market*) tapi juga pasar global (Palmisano, <http://www.ibm.com/ibm/publicaffairs/gp/samforeignaffairs.pdf>).

Selain itu, menarik dicermati, kemajuan teknologi yang berkembang saat ini herbanding lurus dengan kapasitas ekspansi korporasi dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Ini terlihat dari semakin banyak korporasi dari negara maju seperti Australia, Amerika, ataupun Inggris yang membangun fasilitas R & D *service center-nya* di India untuk mendukung kinerja buruh, pelanggan dan produksinya secara global.

Tidak dapat dipungkiri, terintegrasinya bisnis korporasi dalam ekonomi global, otomatis turut mendistribusikan (*deliver*) kemakmuran tidak hanya bagi negara maju tapi juga berkembang. Terintegrasinya angkatan kerja negara berkembang ke dalam sistem produksi global juga berdampak positif terhadap standar hidup, perbaikan kondisi kerja, dan terbukanya kesempatan kerja yang lebih luas. Meskipun patut diakui bahwa kelompok Usaha Kecil/Menengah (UKM) lokal cukup terdesak dan tertantang dengan kehadiran korporasi. Akan tetapi, di sektor tertentu, kelompok ini justru diuntungkan karena dibutuhkan untuk menopang transaksi korporasi di *host country* baik sebagai *supplier* kebutuhan lokal ataupun distributor. Sebagai contoh, beberapa UKM yang bergerak di sektor jasa seperti *catering*, kontraktor, ataupun penyewaan alat-alat berat sangat diuntungkan dengan masuknya PMA *oil company* di Indonesia. Masuknya *oil contractors* di beberapa daerah terpencil provinsi justru menghidupkan ekonomi masyarakat setempat, menyerap tenaga kerja lokal -buruh kasar- dan terjadinya pembangunan di tingkat pedesaan (*rural development*) yang ditandai dengan semakin baiknya akses sarana infrastruktur, seperti jalan, penerangan, air bersih, ataupun fasilitas kesehatan di sekitar lokasi pertambangan. Namun, realitas berbeda dijumpai untuk sektor-sektor tertentu, contohnya sektor jasa retail. Maraknya *hypermarket* ataupun *combinifranchise* asing yang membanjiri pasar Indonesia dengan menawarkan sistem pelayanan

one stop shopping-nya turut menggeser popularitas pasar tradisional karena kalah dalam permodalan dan pelayanan.

Argumentasi dari uraian di atas, tidak berarti menegasikan sejumlah anomali dari praktik yang dijalankan bisnis korporasi. Nyatanya, cukup banyak contoh kasus dijumpai bagaimana kehadiran korporasi justru menimbulkan masalah baru bagi penduduk lokal seperti persoalan lingkungan hidup ataupun gaya hidup konsumerisme irasional implikasi yang terkonstruksikan secara budaya (*mindset*).

Korporasi dan Lingkungan Hidup

Masifnya liberalisasi ekonomi berkorelasi dengan perubahan yang terjadi pada pola produksi, konsumsi masyarakat, dan lingkungan hidup. Ayesta Aparakkakanamage (2005) memberikan contoh yang menarik bagaimana proses liberalisasi di Sri Lanka menggeser ekonomi negara yang bersandar pada sektor pertanian ke sektor industri (manufaktur) juga berimplikasi terhadap lingkungan hidup. Polusi yang diakibatkan proses produksi korporasi biasanya belum begitu terasa untuk industri skala kecil namun berbeda halnya dengan korporasi yang memusatkan proses produksi dengan skala besar di suatu areal tertentu. Pola produksi korporasi dan teknik penanggulangan limbah yang dilakukan dapat berimbang langsung tidak hanya pada ekologi disekitar areal operasional (sungai, hutan, tanah, udara) tapi juga tingkat keamanan penduduk setempat (Aparakkakanamage, <https://drum.urnd.edu/dspacc/bitstream/1903/2443/i/umi-umd-2311.pdf>).

Ayesta menambahkan, ada beberapa indikator menjelaskan korelasi antara pola produksi dan kerusakan ekologi dengan mencermati, (1) jenis dan karakteristik produk yang dihasilkan, (2) jenis species dan habitat yang terancam dengan produk yang dihasilkan.

Asumsi ini terbukti dari contoh kasus lumpur Lapindo Brantas Inc di Jawa Timur ataupun PT, Freeport Indonesia di Papua. Seperti dilaporkan *Lembaga Kaftan Ekologi dan Konversi Lahan Basah* (Ecoton) misalnya, kasus Lapindo yang belum juga teratasi selama 8 bulan ini tidak hanya merugikan penduduk setempat secara sosio-ekonomi tapi juga menyebabkan kematian ikan dan biota air di many 6000 nelayan di Muara Porong menggantungkan hidupnya pada kualitas air bersih untuk keberlangsungan tambak udang windu

mereka (*Ecotori*, <http://www.ecoton.or.id/tulisanlengkap.php?id=1785>)-

Dampak pola produksi atas lingkungan tidak hanya menjadi perhatian negara yang dirugikan, tapi juga masyarakat global. Hadirnya rezim lingkungan hidup di tataran internasional seperti *Kyoto Protocol* misalnya, merupakan wujud kepedulian internasional mendisiplinkan pola produksi korporasi. Namun demikian, lemahnya mekanisme sanksi dari rezim lingkungan hidup menyebabkan ketentuan ini diterapkan secara longgar oleh korporasi. Ini dikarenakan, bagi korporasi, isu lingkungan hidup dan disiplin ekologi dalam pola produksi sebagaimana diatur dalam rezim lingkungan menyebabkan biaya tinggi (*high cost production*) jika ditinjau dari kepentingan bisnis. Ini pula yang menjadi alasan mengapa korporasi memutuskan melakukan relokasi produksi ke negara dengan disiplin lingkungan hidup yang longgar.

Rumitnya lagi, pemerintah seringkali bersifat permisif dan tidak herdaya menekan korporasi dengan memberlakukan sanksi tegas ketika jelas-jelas ditemukan indikasi pencemaran lingkungan akibat pola produksi yang dikerjakan. Ini senada dengan apa yang dipaparkan Lo Sze Ping, Direktur Kampanye *Greenpeace* di Cina: "What concerns environmentalists more, however, is the weak governmental and legal oversight of multinational corporations. As local governments seek to attract foreign investment, their affiliated environmental protection bureaus dare not take strict measures to address pollution by multinational corporations".

Walau demikian, apa yang dilakukan pemerintah Cina menarik ditiru negara berkembang lainnya, khususnya Indonesia. Belajar dari Cina, untuk mendisiplinkan pola produksi, pemerintah Cina mengenakan sanksi atas sejumlah korporasi yang diindikasikan melakukan pelanggaran lingkungan hidup. Seperti dilaporkan *World Watch Institute* (2006), pemerintah Cina mengenakan sanksi kepada sejumlah korporasi seperti American Standard, Panasonic, Pepsi, Nestle dan M3 karena terbukti menyebabkan pencemaran air dan melakukan aktivitas konstruksi tanpa seizin pemerintah (<http://www.worldwatch.org/node/4764>). Diberlakukannya sanksi ini juga merupakan langkah bantahan strategis Cina atas tuduhan internasional bahwa negara ini merupakan penyumbang polusi karbon dioksida (*greenhouse carbon dioxide*) terbesar di dunia mengalahkan AS. Seperti dinyatakan seorang anggota China's National People's Congress (2006): "foreign companies were not only exporting their waste but also underpaying Chinese Workers". LSM di negara ini

mencatat hingga Oktober 2006, sekitar 2.700 korporasi asing, termasuk PepsiCo dan Dupont, diindikasikan melanggar ketentuan negara soal pencemaran air bersih (*The Washington Post*, December 2006).

Selain dikritisi karena dampak lingkungan hidup yang dihadirkan, korporasi juga dituduh `merauni' dan menghimpit konteks kelokalan dan identitas individu karena kefasihannya bermain di ranah kesadaran individu (*needs* dan *fantasy*) dengan mengonstruksikan kesadaran baru (*simulacra*) sebagai bagian dari strategi pemasaran (*marketing*) yang dijalankan.

Korporasi dan Kesadaran Semu

Pencitraan (*image*) merupakan salah satu strategi yang dikembangkan korporasi untuk memenangkan akses pasar atas produknya. Karenanya, korporasi sangat unggul bermain di ranah keinginan dan fantasi individu dengan menciptakan kebutuhan baru melalui kreatifitas produk yang ditawarkan. Kemampuan korporasi bermain di tataran *need* dan *fantasy* menjadi alat yang efektif untuk mengonstruksikan realitas semu (*simulacra*) dalam ranah kesadaran individu.

Terbentuknya budaya pemujaan materialisme dan konsumerisme merupakan gejala yang tak terelakkan seiring dengan berkembangnya semangat pasar (kapitalisme) yang diusung korporasi sebagai pelaku utamanya. Salah satu contoh kasus yang menarik menjelaskan argumentasi ini yakni dugaan politisi India atas terdapatnya kandungan pestisida (*overdose of pesticide in coke brans*) dalam produk minuman ringan yang dipasarkan Pepsi and Coke di negara itu. Kasus ini tidak hanya menjadi wacana elitis tapi juga mendapat tanggapan luas masyarakat India sebagaimana dimuat dalam kolom surat pembaca di harian *India Times* yang mengatakan:

"The high consumption of the colas in the upper classes of the society is only meant to maintain their 'stylish' image. In a week alone, they consume more cola than an average Indian residing in villages. The government should check the availability of such products in the market and insist on healthy alternatives".(<http://timesofindia.indiatimes.com>)

Respons masyarakat India ini menarik diperhatikan sebagaimana diungkapkan pembaca lainnya, terluputnya korporasi minuman ringan

ini dari sanksi hukum karena berangkat dari pembenaran bahwa kasus serupa tidak pernah ditemukan untuk produksi dan pemasaran di negara lain, bukan alasan yang tepat untuk pemerintah menunda melakukan investigasi lebih lanjut dan mencari tahu penyebab terjadinya keeerobahan tersebut (<http://timesofindia.indiatimes.com/artieleshow/1849371.ems>).

Terlepas dari kritik terhadap budaya konsumerisme, sikap konsumtif ternyata tidak selalu berarti buruk. Setidaknya bagi perekonomian. Faktanya di Indonesia dan juga beberapa negara lain, konsumsi jadi komponen terbesar pembentuk produk nasional bruto (P1)8). Konsumsi to% rumah tangga terkaya (yang umumnya lebih banyak bermotifkan gaya hidup) terhadap total konsumsi nasional mencapai sekitar 30%. Ini menunjukkan perilaku konsumtif kelompok kaya juga menjadi penyumbang penting pertumbuhan ekonomi. Sebagai perbandingan, kontribusi konsumsi 10% penduduk termiskin hanya berkontribusi 3,6% dari total konsumsi nasional (Samhadi, www.kompas.com/kompas-cetak/0609/23/Fokus/2971955.htm, 18 Januari 2007).

Perusahaan-perusahaan asing dalam hal ini lebih bisa memanfaatkan tren meningkatnya konsumerisme di Indonesia. Salah satu gambaran nyata bahwa fenomena konsumerisme di Indonesia lebih banyak ditangkap oleh pemain asing adalah data penguasaan pasar garmen lokal di pasar domestik dan lonjakan angka impor tekstil dan produk tekstil yang dilaporkan Asosiasi Pertekstilan Indonesia.

Korporasi dan Dinamika Ekonomi Politik Indonesia

Dinamika ekonomi politik Indonesia tidak bisa dipisahkan dari kontribusi yang dimainkan korporasi asing. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam khususnya sektor minyak dan gas bumi menjadi salah satu daya tarik korporasi asing untuk berinvestasi. Ini teramati dari maraknya sejumlah korporasi asing yang bergerak di sektor pertambangan seperti Total Fina Elf, Caltex, ataupun Schlumberger yang memilih Indonesia sebagai *subsidiary* bisnis eksplorasinya. Menariknya, meskipun pemerintah memberlakukan kebijakan membatasi kelompok bisnis ini hanya bergerak di industri hulu, namun uniknya korporasi asing ini justru menunjukkan performa kerja yang sangat efisien dibandingkan Pertamina sendiri. Ini ditandai dengan terus merosotnya pendapatan pertahun Pertamina meskipun

memegang hak monopoli dalam mengontrol eksplorasi, produksi, distribusi dan retail.

Meningkatnya kontribusi investasi asing dalam perekonomian nasional seiring dengan diterapkannya sistem devisa bebas oleh pemerintah yang ditandai dengan diberlakukannya PP No. 1/1982. Peraturan Pemerintah ini kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya UU No. 24/1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Sudrajat,

www.suaramerdeka.com/harian/0603/22/opio3.htm

Januari 2007). Pemerintah dalam hal ini berupaya keras menghindari pengawasan ketat atas devisa dengan tujuan menghindari hilangnya kepercayaan investor dan terhambatnya aliran modal masuk. Pada tahun 2003, nilai investasi asing melalui korporasi multinasional mencapai Rp 35,2 triliun atau sekitar 28,1% terhadap total nilai perdagangan Indonesia. Jumlah tersebut meningkat cukup drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berkisar Rp 9,6 triliun atau sekitar 8% dari total perdagangan. Selain itu, penjualan saham-saham BUMN (*Initial Public Offering, IPO*) kepada pihak asing juga mendorong kegairahan pasar modal. Pada tahun 2003, penjualan saham-saham tersebut mencapai Rp 7,2 triliun atau 72,6% dari keseluruhan nilai IPO (<http://happeda.jawatengah.go.id>, 16 Januari 2007). Indonesia merupakan salah satu contoh negara yang begitu tergantung pada investasi asing dimana sampai tahun 1997 Indonesia merupakan *net importir* modal asing untuk memenuhi *saving investment gap* neraca pembayaran negara.

Namun demikian, aktivitas korporasi di Indonesia juga sarat sorotan masyarakat, khususnya LSM yang peduli terhadap persoalan lingkungan hidup ataupun sosial. Menurut kelompok ini, tidak sebanding antara keuntungan yang diraup korporasi dengan harga mahal yang harus dihayar negara akibat praktik bisnis dan pola produksi yang dijalankan korporasi. Seiring dengan maraknya investasi asing di Indonesia melalui korporasi-korporasi multinasional, gelombang protes dan antipati dari kelompok LSM semakin menguat. Namun, menurut Mansour Fakhri, LSM-LSM Indonesia saat ini tengah berada di persimpangan jalan dalam menghadapi sistem ekonomi global yang liberal kapitalis. Di satu sisi, bangkitnya gerakan perlawanan rakyat terjadi di mana-mana. Namun di sisi lain, terjadi juga penguatan paham masyarakat liberal yang dipromosikan melalui penguatan masyarakat sipil yang banyak melibatkan LSM. Banyak kebijakan neoliberal telah diterapkan di Indonesia, misalnya pemotongan subsidi negara dan pembebasan tarif produk pertanian, privatisasi BUMN, perguruan tinggi, serta pelayanan kesehatan dan pendidikan. Negara juga dituntut untuk

mengubah kebijakan termasuk peraturan perundang-undangan mengenai pajak, ekspor, hak paten, dan izin pemanfaatan GMO (*genetically modified organism*) di bidang pertanian. Semua fenomena tersebut terjadi hampir tanpa perlawanan berarti dari LSM (Fakih, <http://www.smeru.or.id/>, 18 Januari 2007).

Persoalan sosial dan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh korporasi asing di Indonesia dan banyak mendapat protes dari kalangan LSM, misalnya praktik bisnis Mobil Oil di NAD, dimana tahun 1997 total keuntungan eksplorasi gas Mobil Oil di NAD mencapai \$ 2,1 miliar dolar AS, namun tidak sebanding dengan pendapatan APBD NAD yang hanya sekitar Rp 700 miliar. Ditambah pula aktivitas bisnis Mobil Oil berjarak dengan kondisi masyarakat lokal menyebabkan tidak tersentuhnya tantangan persoalan kemiskinan dan ketertinggalan penduduk lokal melalui ketersediaan keserngapan kerja. Contoh kasus lainnya teramati dari operasionalisasi PT Caltex di Riau. PT Caltex tiap harinya mampu meraup laba sekitar \$ 9,8 juta dolar AS; kontras dengan sekitar 100 desa miskin di sekitar areal perusahaan (Sihbudi *et.al.*, 2001).

Kasus yang paling dominan dan telah mengakar cukup lama adalah konflik antara masyarakat adat Papua (khususnya suku Amungme dan Komoro) dengan PT Freeport Indonesia yang juga melibatkan pemerintah. Konflik ini merupakan fenomena gunung es (*iceberg phenomenon*) karena apa yang terlihat dan teramati publik, hanyalah konflik-konflik di permukaan. Sementara, hakikat konflik yang bersifat laten dan lebih besar, tidak mudah dideteksi.

Lokasi pertambangan Freeport berupa gunung biji tembaga (Ertsberg), pertama kali ditemukan seorang ahli geologi kebangsaan Belanda, Jean Jacques Dory pada 1936. Kemudian ekspedisi Forbes Wilson tahun 1960 menemukan kembali Ertsberg. Freeport pertama kali melakukan penambangan pada bulan Desember 1967 pada Kontrak Karya I (KK 1) (Aditjondro, <http://www.parasindonesia.comj>, 17 Januari 2007). Ekspor pertama konsentrat tembaga ditulai pada Desember 1972 dan beberapa bulan kemudian tepatnya Maret 1973, proyek pertambangan dan Kota Tembagapura ini diresmikan Presiden Soeharto.

Setelah sekian lama dilakukan eksplorasi dan eksploitasi, kandungan tembaga semakin berkurang. Namun, pada tahun 1986 ditemukan sumber penambangan baru di puncak gunung rumput atau dikenal dengan nama Grasberg. Di daerah ini, kandungannya jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Kandungan bahan tambang emas terbesar di

dunia ini diketahui sekitar 2,16 hingga 2,5 miliar ton dan kandungan tembaga sebesar 22 juta ton lebih. Diperkirakan dalam sehari diproduksi 185.000 hingga 200.000 ton biji emas/tembaga. Melihat potensi itu, Freeport memperpanjang KK I dan dibuatlah KK II pada Desember 1991 yang memberikan hak kepada Freeport selama 30 tahun dengan kemungkinan perpanjangan selama 2 X 10 tahun. Ini berarti KK II akan berakhir pada tahun 2021 dan jika diperpanjang, maka akan berakhir pada tahun 2041 mendatang. Sehingga setelah 35 tahun, barulah Freeport kembali menjadi milik Indonesia.

Industri Tambang Freeport Indonesia selama ini hanya menyumbangkan 1% dari total pendapatan bersihnya yang mencapai \$ 3 juta dolar AS perhari pada masyarakat Papua. Patut diketahui 1.738 dari 2.000 desa di Papua tergolong miskin dan masuk Program Inpres Desa Tertinggal. Namun demikian, pemerintah daerah tidak memiliki *sharing* kepemilikan saham sedikitpun atas bisnis Freeport di provinsi ini.

Selain masalah sosial, Freeport juga menimbulkan berbagai persoalan ekologi. Limbah yang dihasilkan oleh PT Freeport (tailing) mencemari tiga badan sungai utama di wilayah Mimika, Sungai Aghawagon, Sungai Otomona dan Sungai Ajkwa. Ribuan ton tailing itu me masuki Sungai Aghawagon kemudian mengalir ke Sungai Otomona dan Sungai Ajkwa. Partikelnya yang tidak mengendap, kemudian ikut mengalir sampai ke Laut Arafura. Dari sebuah studi menggunakan citra satelit Landsat-TM, ditemukan pada tahun 2000, tailing dari operasi pertambangan tersebut telah mengkontaminasi wilayah daratan seluas 35.820 hektar, sementara Laut Arafura telah terkontaminasi seluas 84.158 hektar. Sedangkan dari data Walhi, sekitar 65 persen dari kapasitas produksi Freeport akan menjadi limbah. Padahal, lingkungan sekitar Freeport hanya bisa menoleransi limbah dari produksi yang kapasitasnya hanya bo ribu ton per hari (Aditjondro, <http://www.parasindonesia.com/>, 17 Januari 2007). Dalam tabel di bawah ini, dijelaskan secara sistematis bagairnana PT Freeport Indonesia menimbulkan dampak kerusakan terhadap lingkungan yang cenderung masih primer di Kawasan Timur Indonesia.

Tabel I.
Beberapa Daerah yang Terkena Dampak Negatif Ekologis
Akibat Aktivitas PT Freeport Indonesia

Lokasi	Kegiatan	Dampak
Dariou Wanagon	A. Penribunan dengan <i>taiirra</i> B. Longsornya 190 ribu ton wilf.-ry meluap ke Sungai wanagon	MuSlannya ekosistern Donau Alpin, hilangnya svesies *an, clan OAS ((Metall alran sungai) Wanagon tercernar logarn beret tembage, rnerkui; den seno
DAS Karnora A ik w a , Minajerwi, clan Mawarti f KAMM)	A. Pembuangan tailing 17 rinu ton pernari B. Nlasuknya air asarn tambang ke DAS KAMM	Rusaknya akosistetn riutan pegunurigan sampai hutan bakau Brugueira clan 11 utan rawa. Larutnya logarri dalarn flmbars ke dalarn air sunga, karena asam sulrat
Estuaria clan taut Arafura	Pernnuarigan limbah Perairan pelanutian sampai ceceran rninvak dan kaPai	tercernar logani. Pendarrgkalan s.ungai karena SedinnentaSi tailing bolus. Bioakurnulasi pada ikan sernbllang, kakap, tele, ekor garpu, dll.
Carstensz, Grasberg, clan Erstberg	<i>Open pa</i>	Mencairnya tucking as abadi. Repunnya tartan can batuan yang thsa menyebabican tngsor baser. Polusi udara, cerulean gunung. PemaSan kawasan Puncak 3ayaviajaya
Kota-kota baru (Kuala Kencana, Kwamkl Baru, Ternba0apu -a)	Perribuangan limbah cair, limbati dome Sll k. (rumah Canoga), asap, clan kebisingan	Pencernarar tanah, air, den udara kawasan Tirriika flan sekitarnya
PE_Tti di Petabunan Arnamaraa re	Parnbuanan Orrk%4 gas buang . Pernsuangan Ilmbah panes Pizit 1	Odare dl kawasan A.marnapare tercernar SO4 (sulfat) clan NO2 (rtitrat). Penurunan gas dan oksigen teriarut dalarn air
Perbatasan ekosistern Taman Nasional La ren u.	Lirnp,ahan air akibat masukny wiling ke DAS KAMM	• us'iat,nyo Jenis pelhon Gymnospermae (kelas tanaman bertini dengan br.)i tided terburigkus datarn ovariumni, contohnya pinus dan cernara) di zone subalpin, dan hutan campuran di zone peounuegen Ancarnan terhadap flora fauna endemik seperti buaya inuara, dingtso (kenguru pohon), den peny_u

Sumber: *Majalah TEMPO* No..26/XXIV 19-25 Januari 1999.

Selain inasalah sosial berupa konflik lokal, dampak yang paling dirasakan dari keberadaan korporasi asing di Indonesia adalah budaya konsumerisme. Seperti telah disinggung sebelumnya, kemampuan korporasi membangkitkan realitas semu dalam kesadaran individu telah meninggikan tingkat konsumsi di Indonesia. Selain properti, real-mal atau pusat perbelanjaan, masuknya investasi asing seperi akuisisi perusahaan rokok HM Sampoerna oleh Philip Morris International juga akibat konsumsi terkait gaya hidup. Karena budaya konsumtif, Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat tabungan nasional terendah di Asia Pasifik. Namun, meskipun memiliki angka kemiskinan tinggi, konsumsi masyarakat di Indonesia ternyata mampu menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi beberapa tahun terakhir. Di Indonesia, konsumsi swasta menjadi penyelamat ekonomi di masa krisis, pada scat sektor manufaktur dan ekspor terpuruk, dengan kontribusi ke PDB mencapai 66,5 persen tahun 2004 dan 74 persen tahun 2005 (Samhadi, www.kompas.com/, 18 Januari 2007). Inilah salah satu hal yang menjadikan pemcrintah menibiarkan praktik bisnis korporasi merajalela. Menjadi sebuah dilema bagi pemerintah ketika korporasi asing di satu sisi dapat menggerakkan perekonomian nasional namun di sisi lain keberadaannya menimbulkan berbagai persoalan lokal yang cukup pelik seperti konflik yang bersifat vertikal, terkikisnya jati diri hangsa akibat budaya

konsumtivisme, menurunnya investasi nasional dan mundurnya kinerja industri nasional, hingga pencemaran lingkungan.

Penutup

Selain dampak negatif yang dihadirkan, keberadaan korporasi memang menawarkan berbagai 'laser/tit' dalam ekonomi nasional. Dari segi upah, korporasi menawarkan insentif yang lebih tinggi pada buruh dibandingkan upah minimum nasional. Korporasi juga tidak segan-segan mengeluarkan dana di bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian (R&D) di negara tempat mereka menanamkan investasinya. Namur kembali lagi, kritik yang dilontarkan pada korporasi, insentif yang mereka tawarkan sebenarnya tidak sebanding dengan apa yang harus dibayar pemerintah dalam menanggung resiko keterlibatan korporasi dalam kebijakan ekonomi maupun politik.

Mengingat manuver korporasi yang begitu luas dan pengaruhnya yang sangat kuat dalam kancah ekonomi global, tidak mudah bagi pemerintah Indonesia melepaskan diri begitu saja dari cengkeraman konglomerasi global. Namun tepat kiranya, pemerintah patut mengkaji kembali sejumlah kontrak yang telah disepakati tapi kurang menguntungkan ataupun sarat nuansa KKN; termasuk menata ulang regulasi domestik yang sudah ada. Langkah ini strategis dilakukan agar tercipta ruang yang lebih aman (*secure*) bagi perusahaan domestik untuk *exist* berdampingan dengan korporasi global.

Sebagaimana yang dinyatakan Stiglitz, negara (*nation-state*) tidak dapat menghindar dari proses globalisasi yang berlangsung saat ini. Tak terpungkiri bahwa korporasi dengan keunggulan organisasinya, penguasaan teknologi, akses pasar dan terutama modal (*capital*) menjadi alasan kuat mengapa kelompok bisnis ini dapat bermain di arena global. Satu hal yang perlu direnungkan negara adalah bagaimana proses globalisasi yang sedang berlangsung saat ini dapat menopang kemaslahatan seluruh masyarakat (*how to make globalization works*) termasuk keniscayaan keberadaan korporasi yang tak terelakkan. Berfungsinya aturan main yang jelas di tingkat domestik merupakan cara efektif mengontrol sepak terjang korporasi.

Tersedianya regulasi yang jelas seperti aturan soal monopoli, kompetisi, dan reduksi 'praktik main mata' antara pejabat birokrat dan pelaku bisnis adalah sarana efektif membatasi *power* yang dipegang kelompok bisnis. Sebab, yang paling dikhawatirkan 'oknum orang dalam' justru menikmati menjadi *comprador* kapitalisme (korporasi).

Daftar Pustaka

Buku

- Chandra, Alexander C. 2005. *Indonesia dan Aticaman Perjanjian Perdagangan Bebas Bilateral*. Jakarta: IGJ.
- Goldstein, Josua S. 2007. *International Relations: 2006-2007 edition*. New York: Pearson Longman.
- Hoekman, Benar M. dan Michael P. Keane. 1996. *The Political Economy of the World Trading System: From GATT to WTO*. USA: Oxford University Press.
- Daniel, J., and L. Radenbaugh. 2004. *International Business: Environmental and Operations*. MA: Addison Wesley.
- Ohmae, Kenichi. 1995. *The End of Nation State: The Rise of Regional Economies*. New York: The Free Press.
- Langhorne, Richard. 2006. *The Essentials of Global Politics*. New York: Oxford University Press Inc.
- Palan, Ronen. 2000. *Global Political Economy: Contemporary Theories*. New York: Routledge.
- Papps, Daniel S. 2002. *Contemporary International Relations: Frameworks for Understanding*. Boston: Addison Wesley Longman.
- Prambudi, Daniel & Alexander C. Chandra. 2006. *The Impact of The ASEAN-China FTA on The Indonesian Economy*. Jakarta: IGJ.
- Sihbudi, Riza, et.al. 2001. *Bara dalam Sekam: Identifikasi Akar Masalah dan Solusi atas Konflik-Konflik Lokal di Aceh, Maluku, Papua, dan Riau*. Jakarta: Mizan Pustaka.
- Spanier, John. 1993. *The Games Nations Play*. New York: Holt Rinehart & Winston.
- Stiglitz, Joseph E. 2006. *Making Globalization Work*. New York: W.W. Norton & Company, Inc.

Alma' & Terbitan Berkala

"A comprehensive Guide to International Term of Trade". 1994.
National Trade Data Bank.

"Bethel VS Bolivia". 2004. *The Democracy Center Organization.*

Elizabeth Economy. "A Blame Game China Needs to Stop", *The Washington Post*, December 2006, dalam <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/12/01/AR2006120101519.html>.

Aditjondro, Enrico. "Pesta Belum Usai di Freeport", dalam http://www.parasindonesia.com/sp_read.php?gid=72&spid=24

Fakih, Mansour. "LSM di Persimpangan Jalan", dalam <http://wva.smeru.or.id/newslet/2003/ed08/newslet2oo308.pdf>

"Menebar Bencana Lumpur di Kali Porong", *Ecoton*, 2006, dalam <http://www.ecoton.or.id/tulisanlengkap.php?id=1785>.

"Multinational Corporations" *Share the World's Resources Net*, dalam <http://www.stwr.net/content/view/1164/>.

Bernauer, Thomas. "Political Economy", dalam http://www.cis.ethz.ch/education/Bernauer_polecon.pdf

Tax Breaks for Multinational Corporations", dalam <http://www.ctj.org/hid ent/part-2/part2-4.htm>.

Palmisano, Samuel J. "The Globally Integrated Enterprises" dalam <http://www.ibm.com/ibm/publi cations/gp/ samforeignaffairs.pdf>

Feinberg, Susan E., dan Michael P. Keane, "Accounting for the Growth of MNC-Based Trade Using a Structural Model of U.S. MNCs", *Department of Economics Yale University*, March 29, 2002.

Sadowski, Shana J. "Bringing Multinational Corporations into the Environmental Treaty-Making Process Through the UN Global Compact", http://www.pon.org/downloads/ien14_2sadowski.pdf.

"The Role of the Private Sector in Development" dalam <http://www.nirjdeva.com/book/ii.litm>.

Walter Goldstein, "The Multi-National Corporation: A Challenge to Contemporary Socialism", http://socialistregister.com/socialistregister.com/files/SR_1974_Goldstein.pdf.

Surat Kabar & Majalah

Sudrajat, thwan. "Dik Freeport, ExxonMobil, dan Nasionalisme", dalam <http://www.suaramerdeka.com/harian/o6o3/22/opio3.htm>.

"Kasus Kapas Transgenik: Michael Villareal Datangi KPK", *Gatra*, 2 Februari 2005, dalam [http://www.gatra.com/too\\$-o2-03/artikel.php?id=52748](http://www.gatra.com/too$-o2-03/artikel.php?id=52748)

"Konsolidasi investasi Tanpa Daya Dorong", *Kompas*, 6 Maret 2003, dalam http://kompas.com/kompas_cetak/0303/06/ekonomi/163499.htm.

Majalah TEMPO No.16/XXVII/ 19-25 Januari 1999.

Readerspeak: Vendetta Againts MNC Cola Giants", 16 Januari 2007, dalam <http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/1849371.cms>.

Samhadi, Sri Hartati. "Dalam Cengkeraman Konsumtivism", dalam <http://www.kornpas.com/kompas-cetak/0609/23/Fokus/2971955.htm>

Alamat Situs Internet

http://www.democracyctr.org/bechtel/bechtel_corp.html,

<http://www.stwr.net>

<http://www.cis.ethz.ch>

<http://www.ctj.org>

<http://www.nirjdeva.com>

<http://www.socialistregister.com>

<http://www.gatra.com>

<http://www.kompas.com/kompas>

<http://www.pon.org>

<http://www.ecoton.or.id>

<http://www.washingtonpost.com>

<http://timesofindia.indiatimes.com>

[ht-tp://bappeda.jawatengah.go.id/index-n.php/lang.ina/index.perencanaan/sub.dokumen/dok.09%243%20Narasi %20Bid%20Ekonomi/type.pdf](http://bappeda.jawatengah.go.id/index-n.php/lang.ina/index.perencanaan/sub.dokumen/dok.09%243%20Narasi%20Bid%20Ekonomi/type.pdf)